



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOMOR SKRIPSI
7556/PMI-D/SD-S1/2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MEMBANTU KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA
MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN
KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata (S-1)

Sosial (S.Sos)

Oleh:

BELLA SEPTITANIA

NIM : 118401222701

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

©



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة والاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM 15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Bella Septitania
NIM : 11840122701
Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Januari 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 2 001

Sekretaris/ Penguji II,

M. Imam Arifandy, S.KPm., M.Si
NIP. 1993051 202012 1 016

Penguji III,

Dr. Darusman, M.Ag
NIP. 19700813 199703 1 001

Penguji IV,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd, CIIQA
NIP. 19750927 2023211 005

Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Pekanbaru, 10 Januari 2024

No : Nota Dinas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

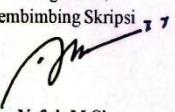
Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Bella Septitania Nim 11840122701** dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar" Telah dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Skripsi/Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Yefni, M.Si
NIP. 19700914 201411 1 002



UIN SUSKA RIAU

©

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara.

Nama : Bella Septitania

Nim : 11840122701

Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Yefni M.Si

NIP. 19700914 201411 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bella Septitania
Nim	: 11840122701
Tempat/Tanggal Lahir	: Muara Mahat Baru, 7 September 1999
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Januari 2025

Yang membuat pernyataan


Bella Septitania
11840122701

 Dipindai dengan CamScanner

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Bella Septitania

NIM : 118401222701

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PkH) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program yang di gagas oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya pemutusan rantai kemiskinan, Namun faktanya di desa Muara Mahat sendiri beberapa penerima pkh secara subjektif adalah termasuk masyarakat yang mampu dilihat dari rumah dan asset tidak bergerak yang dimiliki, selain itu terdapat fenomena yang mana keluarga miskin yang harusnya mendapatkan PKH malah tidak menerima PKH. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George Edwar III Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari pendamping pkh, aparatur desa, dan 2 orang KPM. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi program Keluarga Harapan Di Desa Muara Mahat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan teknis dan pedoman program keluarga harapan dari kementerian social. Program keluarga harapan mampu untuk mensejahterakan masyarakat miskin baik dalam aspek Pendidikan dengan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar yang dengan begitu anak-anak Indonesia bisa mengenyam bangku pendidikan secara merata, Kesehatan dengan peluncuran Kartu Indonesia Sehat yang memberikan jaminan pengobatan kepada masyarakat miskin, dan juga kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok. Sehingga dengan adanya PKH maka bisa membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai upaya pemutus rantai kemiskinan di masa yang akan datang. Kendala dalam PKH yaitu PKH yang tidak tepat sasaran. Adapun upaya pemerintah desa untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan pembaharuan data dan evaluasi pada data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas pendamping yang berperan sebagai fasilitator, narasumber, mediator melalui kegiatan p2k2 untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci : Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Desa Muara Mahat Baru

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Bella Septitania

NIM : 118401222701

Title : Implementation of the Family Hope Program (PkH) in Helping the Welfare of the Poor in Muara Mahat Baru Village, Tapung District, Kampar Regency

The Family Hope Program (PKH) is one of the programs initiated by the central government as an effort to break the chain of poverty. However, in fact, in Muara Mahat village itself, subjectively some of the PKH recipients are among people who can be seen from their homes and the immovable assets they own. Apart from that, there is a phenomenon where poor families who should receive PKH do not receive PKH. This research uses policy implementation theory according to George Edward III. This research is a type of descriptive qualitative research using observation, interviews and documentation as data collection tools. The informants in this research were 4 people consisting of pkh assistants, village officials, and 2 KPM people. The results of the research explain that the implementation of the Family Hope program in Muara Mahat Village was carried out well in accordance with the technical rules and guidelines for the Family Hope program from the Ministry of Social Affairs. The family hope program is able to improve the welfare of the poor, both in terms of education by launching the Smart Indonesia Card, which means Indonesian children can receive education evenly, health by launching the Healthy Indonesia Card which provides guaranteed medical treatment to the poor, and also welfare through fulfilling basic needs. So that with PKH, quality human resources can be formed as an effort to break the chain of poverty in the future. The obstacle in PKH is that PKH is not on target. The village government's efforts to overcome this problem include updating data and evaluating integrated social welfare data, increasing the capacity of assistants who act as facilitators, resource persons and mediators through p2k2 activities to provide understanding to beneficiary families.

Keywords: Family Hope Program (PKH), Welfare of the Poor, Muara Mahat Baru Village



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan memanajatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya, serta shalawat dan salam penulis limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pertama penulis berterimakasih kepada kedua orang tua teristimewa dan tercinta Ayahanda Yulisman dan Ami Nilam Zulma atas limpahan do'a dan keringat dalam mencari nafkah untuk mendukung anaknya meraih cita-cita serta dorongan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE., M.Si.,Ak.,CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Wakil Dekan I Dr. Muhammad Badri, M.Si., Wakil Dekan II Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si dan Wakil Dekan III Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom.
3. Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
4. Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Sekaligus Sebagai Pembimbing Akademik Penulis.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Kepada Pihak Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kampar yang telah memberikan izin untuk penulis melaksanakan penelitian.
7. Suami Tercinta Radiansyah Putra yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, menjadi teman cerita suka duka dalam skripsi ini
8. Terimakasih kepada nenek Alm. Marnis sebagai donator utama yang selalu memberikan support baik psikis maupun keuangan kepada penulis dari awal perkuliahan,, semoga nenek bangga di alam sana,, semoga Allah menerima semua amal ibadah nenek
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis saudara kandung Yongse Surya Wiyaguna, Paman Supratman, Bibi Patmayana Oktabvianti, Mama Wilda Kusuma dan Kaka Odilia Sonya Litari.
10. Serta seluruh elemen yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 26 Desember 2024

Penulis

Bella Septitania

Nim : 118401222701



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Penegasan Istilah.....	4
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teori	8
2.3 Konsep Operasional	22
2.4 Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Sumber Data	25
3.4 Informan Penelitian.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Validitas Data	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Sejarah Desa Muara Mahat Baru	31
4.2. Visi Misi Desa Muara Mahat Baru	32
4.3. Letak Geografis Desa Muara Mahat Baru.....	32
4.4. Kondisi Demografi.....	34



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Batas Wilayah	33
Tabel 4.2 Luas Tanah	33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.4 Klasifikasi Pendidikan Penduduk	35
Tabel 4.5 Kepercayaan Penduduk.....	37
Tabel 4.6 Profesi Penduduk	38
Tabel 5.1 Indeks Bantuan Sosial PKH.....	60
Tabel 5.2 Daftar Nama KPM Yang Di Graduasi	63
Tabel 5.3 Materi Pertemuan P2K2.....	64



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	24
Gambar 5.1 Model Pendekatan Implementasi Menurut George Edwar III	57
Gambar 5.2 Proses Penyaluran PKH	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap negara di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang di alami oleh semuanegara di dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara majumeski jumlahnya tidak besar.¹

Kesejahteraan adalah tujuan agama Islam, salah satunya pada aspek ekonomi dalam hal ini Allah telah mengungkapkan konsep kesejahteraan dalam QS Al-Jatsiyah /45:13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَنْفَعُونَ

Artinya : *Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir*

Q.S Al-Jatsiyah ayat 13 menjelaskan bahwa Allah telah menyerahkan yang ada dilangit maupun dibumi sebagai karunia Allah kepada manusia dan sebagai sarana untuk merasakan kesejahteraan oleh karena itu manusia dituntut selalu menggunakan akal pikirannya dan berupaya mengunkannya dengan baik agar kesejahteraan bisa dicapai pada diri manusia.

Sebagai suatu program perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Desa Muara Mahat Baru merupakan salah satu dari sekian banyak desa di kabupaten Kampar yang melaksanakan PKH. Di desa Muara Mahat Baru, program ini sudah berjalan namun tingkat prioritas penetapan peserta PKH masih belum terakomodir dengan baik. Hal

¹ Isbandi Rukmianto, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018),hlm. 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat kalangan kelas menengah keatas yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial melalui pemberian dana non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Menurut Peraturan Menteri no 1 tahun 2018 program keluarga harapan (PKH) ialah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Tujuan PKH menurut PERMEN SOS No 1 tahun 2018 adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga, dan mengurangi anggakemiskinan dan kesenjangan.

Adapun syarat penerima PKH adalah ibu hamil/nifas/menyusui, atau memiliki anak balita yang berusia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, SMP, dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan ialah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi, sehingga harus diberantas atau paling tidak dikurangi. Kemiskinan ekonomi secara umum adalah kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Istilah “negara berkembang” digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Kemiskinan, ternyata bukan sekedar sebuah kata benda atau kata sifat. Kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan telah menjadi sebuah persoalan kehidupan manusia, kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan.²

² Diah Luthfi Hidayati, *Bantuan Langsung Tunai (BLT) upaya membangun kesadaran teologis terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia.* (di akses pada 24 April 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan. Pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.³

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan adalah penyakit yang biasa ada di negara berkembang, kemiskinan dapat mengganggu kualitas hidup dalam berumah tangga menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya dantentunya masyarakat miskin tidak dapat memenuhi kebutuhannya seperti masyarakat lain pada umumnya. Oleh karena itu pemerintahan Indonesia membuat Program Keluarga Harapan (PKH) guna untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang berbasis keluarga jadi hanya keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utamanya adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga salah satu program prioritas nasional yang dijadikan atau dibuat oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek mengurangi beban Keluarga Miskin (KM) dan dalam jangka Panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari zona kemiskinan. faktanya di desa Muara Mahat sendiri beberapa penerima pkh secara subjektif adalah termasuk masyarakat yang mampu dilihat dari rumah dan asset tidak bergerak yang dimiliki, selain itu terdapat fenomena yang mana keluarga miskin yang harusnya mendapatkan PKH malah tidak menerima PKH

³ Andi Matalata, *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, (Jakarta: Kepala Biro Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, 2009), hlm. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis kemudian tertarik untuk mengetahui seperti apa Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sehingga penelitian ini berjudul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin DiDesa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**

1.2. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan, maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang digunakan:

1. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang satu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.⁴

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program yang berbasis perlindungan umum yang bersifat memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang dikategorikan kurang mampu selain itu program ini juga ditujukan untuk mensejahterakan rakyat baik di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu situasi yang menggambarkan tercukupinya kebutuhan manusia yang dapat dilihat dari tempat tinggal yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah tetapi berkualitas atau situasi dimana setiap manusia mampu menggunakan pendapatannya dengan baik

⁴ Abdul Majid. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan situasi dimana kebutuhan jasmani maupun rohani manusia terpenuhi

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka bahasan yang menjadi tumpuan utama dari penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam pembahasan, baik terhadap penulis maupun pembaca, maka dalam penulisan ini hanya memfokuskan kepada permasalahan terkait Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?.

1.4.Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini jika dilihat dari latar belakang adalah untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan tapung Kabupaten Kampar.

1.5. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, disamping sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tugas akhir program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti bidang Pengembangan Masyarakat Islam, serta menambah wawasan peneliti dalam melihat implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan tapung Kabupaten Kampar.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi para akademisi untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Bagi masyarakat Umum sebagai wadah pengetahuan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang pemerintah keluarkan untuk membantu masyarakat dengan kategori ekonomi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebawah.

1.6. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan memudahkan dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB I | : Penduluan pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. |
| BAB II | : Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. |
| BAB III | : Metodologi penelitian berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. |
| BAB IV | : Gambaran umum berisikan tentang lokasi penelitian atau subyek penelitian |
| BAB V | : Hasil penelitian dan pembahasan berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dari pembahasan. |
| BAB VI | : Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran. |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan penelusuran terhadap peneliti-peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Kartika Ayu, Sutomo, dan Kholid Azhari dengan judul *Jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Jurnal Ekonomi Ekulibrium Volueme 4 No. 1 (2020)*. Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan di Kabupaten Jember yang berfokus di Kelurahan Pancakaraya dengan menggunakan beberapa metode hampir sama dalam pengambilan konsep teori, dan untuk perbedaan peneliti melakukan dengan waktu dan lokasi yang berbeda.⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Depi Zahrawati dan Henni Muchtar dengan judul *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman, Jurnal Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 1 No. 4 (2018)*. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH pada realitasnya mengalami permasalahan dari pusat ke daerah serta dampak implementasi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat dari segi akses pendidikan dan kesehatan.⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dengan judul skripsi *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh*, lulusan 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri

⁵ Kartika Ayu, Sutomo, dan Kholid Azhari, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Jurnal Ekonomi Ekulibrium Volueme 4 No. 1 (2020)*.

⁶ Depi Zahrawati dan Henni Muchtar, *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman, Jurnal Journal of Civic Education (ISSN: 2622- 237X) Volume 1 No. 4 (2018)*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir, adapun yang membedakan penelitian kajian terdahulu adalah lokasi penelitian dimana kajian terdahulu di Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir dan penulis melakukan penelitian di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal, Indragiri Hulu.⁷

2.2 Kajian Teori

1. Konsep Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, implementasi menurut kamus Webster mengatakan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi diartikan sebagai "pelaksanaan atau penerapan" artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan dalam suatu program. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secaramatang dan terperinci. Dalam hal ini berarti implementasi diartikan sebagai proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang mana implementasi tersebut menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek dan pengaruh pada sesuatu.⁸ Menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap⁹. Definisi

⁷ Fitriana, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pulau Kecil Kecamatan Rete*, 2020

⁸ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012

⁹ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implikasi atau implementasi juga dapat bervariasi menurut para ahli. Beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Implementasi Menurut dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peneliti. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai secara tegas. Dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (*in stansi*) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok kelompok sasaran, dampak nyata baik mengambil keputusan sebagaimana di persiapkan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan perbaikan) terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang bersangkutan.¹⁰
- 2) Menurut Mulyadi implementasi mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis implementasi adalah

Teras, 2012), hlm. 189-191

¹⁰Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pelaksanaan keputusan dasar proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
 3. Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
 4. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak.
 5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.
- 3) Implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti adalah kegiatan yang mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seseorang pelaksana untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.
 - 4) Implementasi menurut Nurman Usman adalah adanya suatu kegiatan, Tindakan aksi atau mekanisme system yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
 - 5) Implementasi menurut Sudarsono dalam bukunya “ analisis kebijakan publik “ implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana (tools) untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.
 - 6) Implementasi menurut Adiwisasta adalah merupakan sesuatu yang penting kebijakan public akan menjadi macan kertas apabila tidak berhasil dilaksanakan.¹¹ Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan program karena

¹¹ Kadji Yulianto, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan prilaku Birokrat Dalam Fakta Realitas,(Gorontalo: UNG Press 2015)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi menjadi penentu apakah program itu berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak.

b. Tahapan Implementasi

Tahapan implementasi dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

1) Tahapan Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah salah satu fungsi aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan alat atau sarana-prasarana guna menunjang keberlangsungan suatu program.¹²

Jadi perencanaan merupakan suatu proses yang menentukan hal-hal yang akan dicapai dari tujuan yang diinginkan sesuai dengan tata cara yang telah direncanakan sebelumnya

2) Tahap pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan detail, penerapannya biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap siap untuk dilaksanakan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai penerapan.¹³ Jadi pelaksanaan adalah tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk diterapkan dan siap untuk dilakukan secara matang.

3) Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.¹⁴ Dalam artian lain, evaluasi berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menentukan nilai atau hasil untuk sesuatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-

¹² Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23

¹³ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), 70

¹⁴ Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), 397



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acuan atau pedoman tertentu untuk menentukan hasil yang optimal dari tujuan yang ingin dicapai.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Kebijakan publik merupakan salah satu program yang menyertakan sarana dan prasarana dibuat oleh sutau organisasi atau institusi publik yang membutuhkan penerapan dan tujuan ke khalayak ramai dengan mempertimbangkan berbagai hal yang menghambat dan mendukungnya. Menurut Nugroho¹⁵“any of State or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society)” Yang diartikan bahwa kebijakan publik adalah: setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan¹⁶

d. Model Implementasi Kebijakan George Edward III)

Menurut Edward di dalam Subarsono¹⁷, melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edwar mendefinisikan kebijakan publik dalam 2 hal pokok diantaranya sebagai berikut :

¹⁵ Riant Nugroho.Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014

¹⁶ Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

¹⁷ Subarsono, 2005, “Analisis Kebijakan Publik”, Pustaka Pelajar, Yogjakarta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Dalam menjawab menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.

1) Komunisi (Communication)

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency)

2) Sumber Daya (*resources*)

implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan..

3) Disposisi (*disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4) Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melengkapi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.¹⁸

2. Konsep Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) ialah program yang berbasis perlindungan umum yang bersifat memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang dikategorikan kurang mampu selain itu program ini juga ditujukan untuk mensejahterakan rakyat baik di bidang Pendidikan dan Kesehatan. PKH Diharapkan jadi sebuah program yang dapat mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan yang tepat¹⁹ Program Keluarga Harapan (PKH) juga diartikan sebagai program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan renta yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat

¹⁸ Ibid

¹⁹ Nurul Fahmi dan khairil anwar. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan, Bertuah*:Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 1 (2), 2020



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Keluarga Harapan (PKH).²⁰

Program keluarga Harapan atau yang biasanya disingkat menjadi PKH adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dalam rangka memberantas kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Permensos nomor 1 Tahun 2018, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan informasi kesejahteraan Sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH²¹

Menurut Pandangan Islam PKH adalah salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan, islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang memerluka penyelesaian Allah telah menyinggung dalam al-qur'an surah az-zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ تَحْنُّ قَسْمَنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٌ لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH

Adapun dasar hukum dalam Pelaksanaan PKH antara lain:

1. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nomor 40 Tahun 2004.
2. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial. Nomor 11 Tahun 2009.
3. Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin Nomor 13 Tahun 2011 (Ady Ardyansah, 2018).
4. Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

²⁰ PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1

²¹ Ibid



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rakyat sebagai kepala Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. No:31/KEP /MENKO-/KESRA/IX/2007 mengenai "kelompok Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.

5. Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai " kelompok Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008 No. 02A/HUK/2008.
6. Kebijakan Gubernur mengenai "kelompok Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD".
7. Kebijakan Bupati/ Walikota mengenai "kelompok Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/ Kota/ TKPKD".²²

c. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum PKH adalah untuk Memperkecil tanggungan pengeluaran keluarga miskin untuk waktu yang singkat serta menghentikan belenggu kemiskinan untuk waktu yang panjang. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.²³ Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kualitas kesehatan KSM.
- 2) Memperbaiki taraf pendidikan anak-anak KSM.
- 3) Memperbaiki akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khusus bagi anak-anak KSM

UIN SUSKA RIAU

²² Yuni Aliyatul Rohmah .*Analisis Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (Studi Deskriptif Akuntabilitas Administratif Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Kecamatan Semampir Surabaya)*, Jurnal Aplikasi Administrasi, 18,, 2015 1–8.

²³ Syahputra Adisanjaya, dkk. *Program Keluarga Harapan (PkH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*, jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 4(1), , 2017, 88–92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 2 peraturan menteri sosial republik indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Sebutkan Bahwa PKH bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan,Kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluargamiskin dan rentan.
- 3) Meciptakan perubahan prilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenal manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM (Pedomam PKH.

d. Sasaran Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH disebutkan bahwa, sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada Pasal 4, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa:

- 1) Sasaran PKH Akses merupakan keluarga keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.
- 2) PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah: pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, atau perbatasan antar negara.

e. Besaran Bantuan PKH

Bantuan Sosial PKH di salurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan beban kebutuhan kelurga pada aspek kesehatan, pendidikan dan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan sosial akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan bebantanggungan dari setiap keluarga. Artinya besaran nominal jumlah bantuan setiap penerima bantuan tidak akan sama, hal ini dihitung berdasarkan jumlah komponen masing-masing KPM PKH.

f. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Tahapan pelaksanaan PKH diantaranya pendamping menetapkan keluarga yang berhak menerima bantuan selanjutnya akan diadakan sosialisasi terkait PKH kemudian diadakan pertemuan awal antara pendamping dengan peserta PKH setelah itu dibentuklah kelompok keluarga penerima manfaat oleh pendamping dan setiap penerimaan dana PKH akan diadakan pembaharuan data. Selanjutnya pendamping akan melakukan penyaluran bantuan dan pelaksanaan tanggung jawab mengenai penggunaan dana oleh peserta. Tata cara penyaluran bantuan sosial secara non tunai mencakup pembukaan rekening bagi peserta PKH, kegiatan sosialisasi dan pembelajaran mengenai PKH, penyaluran KKS Kartu Keluarga Sejahtera, penyaluran bantuan dana PKH, penarikan bantuan dana PKH, penyelesaian hasil penyaluran bantuan sosial serta pengamatan, penilaian dan melaporan dan proses pertanggung jawaban serta evaluasi program keluarga harapan

g. Hak Dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

Adapun hak peserta PKH adalah mendapatkan bantuan berupa uang tunai dan pendampingan sosial sedangkan kewajiban KPM di bidang kesehatan yang harus dilakukan seperti mengikuti pemeriksaan kandungan bagi ibu yang hamil, melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu yang nifas, memeriksakan anak usia balita dan usia pra sekolah ke fasilitas kesehatan, di bidang pendidikan yaitu memasukan anaknya sekolah pada satuan pendidikan dan yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.²⁴

²⁴ Hasna, N. M. and dkk. (2020). *Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, *Citizenship jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (2),108–116.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah kebebasan bagi setiap individu dari belenggu kemiskinan ketidaktahuan dan rasa khawatir sehingga mampu mendapatkan hidup yang bebas dari bahaya dan tenteram secara lahiria lahiria.²⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sejahtera mengacu pada keadaan yang bebas dari bahaya, sejahtera, dan serba berkecukupan. Undang- Undang No 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusastraan dan ketenteraman lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila.²⁶

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu situasi yang mengambarkan tercukupinya kebutuhan manusia yang dapat dilihat dari tempat tinggal yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah tetapi berkualitas atau situasi dimana setiap manusia mampu menggunakan pendapatannya dengan baik dan situasi dimana kebutuhan jasmani maupun rohani manusia terpenuhi. Kesejahteraan mempunyai kategori yang dapatkan secara bertingkat dan berjalan sesuai urutannya Tahap 1 kebutuhan pokok (basic needs atau kebutuhan fisik terpenuhi (physiological needs), Tahap 2 (safety needs) kebutuhan akan rasa aman yang terpenuhi, tahap 3 terpenuhinya (social needs) kebutuhan sosial, Tahap 4 terpenuhinya (esteem needs) kebutuhan akan pengakuan dan tahap 5 (self actualization needs) kebutuhan aktualisasi diri yang terpenuhi.²⁷

Menurut Fahrudin dalam Mawarni untuk mencapai kehidupan sejahtera ada

²⁵ Amirus Sodiq . *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam* , Jurnal Equilibrium, 3(2).2015, 384

²⁶ Afida, Ifa. *Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern*. Jurnal Al-Tsama. 2 (1).2020

²⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2017). *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islami*”, Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2), 239.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa indikatornya yakni 1) kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan yang cukup. 2) terpenuhinya pendidikan sesuai dengan standar nasional. 3) setiap anak wajib belajar selama 12 Tahun dan maksimalnya hingga sampai Perguruan Tinggi. 4) Masyarakat yang sehat akan jasmani dan rohani. 5) hubungan yang harmonis dengan lingkungan.

Indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan tingkat kesejahteraan keluarga yaitu:

- 1) Tahap *pra sejahtera*, Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana.
- 2) Tahap *sejahtera I*, Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan yang layak.
- 3) Tahap *Sejahtera II*, Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator diantaranya:
 - a) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 - b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
 - c) Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk berkomunikasi.
 - d) Mengikuti kegiatan masyarakat.
- 4) Tahap *sejahtera III*, Secara operasional mereka tampak tidak mampu memenuhi salah satu indikator diantaranya:
 - a) Memberikan sumbangan materil secara teratur.
 - b) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Tahap *sejahtera III plus*, Keluarga sejahtera III plus merupakan keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga para sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III.²⁸

b. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsiannya setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial. Menurut Fahrudin tujuan khusus kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yg sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumbersumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²⁹

c. Konsep Kesejahteraan Sosial Bagi Program Keluarga Harapan

Badrudin mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.³⁰ Selain itu, sumber lain juga mengungkapkan bahwa kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan

²⁸ Sandi andika dan safitri. *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa mekar delima kecamatan tasik putri puyu)*, journal of shariah and islamic economics . 2 (1), 2021

²⁹ Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung : PT Refika Aditama, 2021),hlm. 10

³⁰ Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP STIM. YKPN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenram dan batinnya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1): “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.³¹

2.3 Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teori yang dijabarkan diatas, kajian ini berkenaan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Muara Mahat baru. Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Implementasi merupakan suatu proses yang diamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada hakikatnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan implementasi dalam kajian ini adalah pelaksanaan PKH, atau pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

Konsep implementasi ini bertujuan agar dalam pelaksanaan program PKH ini berjalan dengan lancar dan mengenai target sasaran yang tepat sebagai masyarakat yang betul layak menerima bantuan sosial atau PKH. Dapat disimpulkan bahwa apabila implementasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam konsep operasional penulis merumuskan konsep operasionalnya yaitu: Implementasi Program PKH untuk Menanggulangi Kemiskinan Masyarakat di desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar melalui konsep teori

³¹ Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi yang telah dipaparkan di atas memiliki empat indikator yang digunakan sebagai acuan keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi

komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan yang menyesuaikan implementasi kebijakan dengan tujuan atau sasaran..

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam membuat kesimpulan sementara, terdapat hubungan antar variabel, inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai kerangka berfikir, yang mengarahkan peneliti untuk membuat skem mengenai Implementasi melalui Program PKH dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ka
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pen
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaraya

ni tang
enelit
ar UIN
n atau

1. Melalui komunikasi kelompok pada pada kegiatan P2K2
2. Koordinasi dengan pihak desa, kecamatan dan Kabupaten melalui koordinator masing-masing

State Islamic U

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar



Implementasi PKH
(Edwar III)

Komunikasi

Sumber daya

Disposisi

Struktur Birokrasi

1. Jumlah KPM di Desa Muara Mahat adalah 238 KK
2. Untuk meningkatkan SDM Pendamping maka pendamping mengikuti pelatihan pendampingan PKH

1. Merestapel KPM yang sudah di anggap mandiri
2. Pemerintah desa memasukkan nama masyarakat kurang mampu di DTKS untuk pengajuan PKH

1. Struktur birokrasi PKH dimulai dari kementerian, direktur, koordinator regional, koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, pemerintah desa dan pendamping PKH

Dapat Membantu Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Muara Mahat Baru, melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini yang digunakan peneliti yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan dan memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya mengenai tindakan, perilaku, persepsi, upaya, motivasi, dan lainnya. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistikatau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.³² Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari pemerintahDesa Muara Mahat Baru. Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif agar dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait informasi program PKH.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pemilihan Lokasi dan waktu dalam penulisan ilmiah menjadi modal utama sebagai sasaran bahan kajian. Dengan demikian penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk mendapatkan fakta yang akurat dilapangan. Lokasi penulisan ini dilakukan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun waktu penelitianini berlangsung setelah proposal diseminarkan.

3.3 Sumber Data Penelitian

Suatu kajian penulisan perlu sumber data yang benar-benar akurat dan faktual. Hal tersebut barulah dapat dikatakan bahwasanya penulisan itu benar- benar dilakukan. Maka, sumber data merupakan salah satu hal utama dan terpenting pada sebuah penelitian.Oleh sebab itu, sangat diperlukan sumber data dalam penulisan, sehingga penulis perlu melakukan sasaran subjek sebagai sumber data. Kemudian penelitian dapat dilaksanakan. Ada dua macam sumber data yang penulisambil sebagaimana dalam penulisan kualitatif yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut:

³² Sujarweni, V.Wiratna. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)
Hlm, 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat authentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.³³

3.4 Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang berkompeten dari pemerintah desa Muara Mahat Baru dan masyarakat penerima PKH yang memiliki informasi tentang pelaksanaan PKH. Subjek dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan siapa yang akan dan siapa yang menjadi karakteristik yang akan di teliti dalam hal ini populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.³⁴ Subjek dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun objek dari penelitian ini adalah masyarakat miskin Desa Muara Mahat Baru. Informan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Renaldo Ginting	SekDes Muara Mahat Baru	1 Orang
	Eza Aprilia Sari	Pendamping PKH	1 Orang
	Lisa Dianti	Masyarakat Penerima PKH	1 Orang
	Vica Landari	Masyarakat Penerima PKH	1 Orang
Jumlah			4 Orang

³³ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 2008,), hlm.93

³⁴ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 102

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrument*). Dalam hal ini si peneliti terjun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Berikut ini teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail. Instrumen ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara tersusun secara sistematis. Pada penelitian ini penulis menggunakan kedua metode wawancara seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar informan tidak hanya memberikan jawaban-jawaban secara lengkap saja melainkan agar informan tetap dapat menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini yang penulis wawancara yaitu pemerintah desa Muara Mahat baru dan dua orang masyarakat penerima PKH, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pendamping PKH dan dua orang masyarakat penerima PKH.

2. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu faktamengenai dunia kenyataan yang diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui observasi.³⁵Pada penelitian ini penulis hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Pada penelitian ini dokumentasinya sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil kerajinan, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.³⁶

3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data atau kesimpulan, dari hasil penelitian dan diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpul. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber berbagai cara dan waktu³⁷

3.7 Analisis Data

Menurut Mudjiarhardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

³⁵ Sugiyono. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 64

³⁶ Ibid

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2017), hlm. 218

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis.

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua dan terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan data tujuan peneliti yaitu yang berkaitan dengan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Muara Mahat Baru. melalui kegiatan wawancara observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengintiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.³⁸Pada prosedur reduksi data ini, data direduksi dan ditransformasi dalam upaya agar data menjadi lebih mudah terakses, lebih mudah dipahami.

3. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Tujuan penyajian data adalah mendeskripsikan ide-ide utama dalam data yang disajikan secara terorganisir dan gabungan informasi terabstraksi yang memungkinkan kesimpulan menjadi dapat diambil.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus

³⁸ Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Jadi, analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Setelah data diperoleh dari lapangan kemudian disusun secara sistematis serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan, kemudian data tersebut di analisis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan dan akhirnya.³⁹

Jadi, penulis menggunakan metode kualitatif, setelah mendapatkan data dari lapangan melalui sistem wawancara yang tersusun secara sistematis serta selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan fenomena serta gejala yang ada dilapangan, setelah data tersebut diaanalisis maka didapatkan kesimpulannya.



UIN SUSKA RIAU

³⁹ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Sejarah Desa Muara Mahat Baru**

Desa Muara Mahat Baru adalah sebuah Desa pindahan dari Desa Muara Mahat Lama pada tahun 1994. Desa ini merupakan satuan pemukiman dahulunya atau disingkat dengan SP. Sebelum menjadi Desa, dahulu Muara Mahat Baru disebut dengan SP 3 bangkinang 10 G. awal mula terbentuknya Muara Mahat Baru sebagai Desa merupakan hasil juang musyawarah para tokoh masyarakat saat itu yang berhama Dt Abbas Gudang yang merupakan kepala kelurahan saat itu di Desa Muara Mahat Lama dengan bapak Hendrik Subagyo sebagai ketua KUPT atau Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi.⁴⁰ Upaya menjadikan SP 3 Bangkinang 10 G sebagai Desa akhirnya mencapai titik terang pada tanggal 24 maret 2002. Hal ini kemudian dipertegas dengan kode administratif dari Kemendagri dengan nomor. 14.01.10.2020.⁴¹

Pada awalnya, Muara mahat adalah sebuah kelurahan berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 dengan kepala kelurahan Dt. Abbas Gudang dan dibantu oleh 5 perangkatnya. Akan tetapi, ketika Muara Mahat di Transmigrasi oleh pemerintah akibat rencana pembuatan bendungan PLTA Koto Panjang, maka Muara Mahat Baru diubah statusnya menjadi Desa. Hal ini diakibat oleh tiga alasan, yaitu:

1. Kelurahan tidak boleh berada di daerah Transmigrasi.
2. Muara Mahat Baru berada di Tapung sedangkan SK kelurahan Desa ini terletak di XIII Koto Kampar.
3. Muara mahat baru tidak berada dalam kawasan inti kecamatan.

Sehingga, atas dasar ini Muara Mahat Baru diubah status nya menjadi sebuah Desa.dengan status baru, kini Muara Mahat Baru terletak di kecamatan tapung kabupaten Kampar sebagai sebuah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa. Muara Mahat Baru merupakan sebuah Desa yang kokoh dengan adatnya. Hal ini bisa dipantau lewat pengikut sertaan adat dalam setiap gerak-gerik, putusan dan

⁴⁰ Wawancara dengan mantan kepala desa Muara Mahat Baru dan juga penghulu adat suku Domo Dt. Abbas Gudang Paduko Simarajo pada tanggal 9 september 2024. Pukul. 14.35

⁴¹ Muara Mahat Baru Wikipedia.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acara yang diadakan oleh Desa ini, sehingga di Desa ini terdapat ninik mamak sebagai penasehat negeri untuk memutuskan satu putusan yang bersifat mengandung kepentingan bersama.

4.2 Visi Dan Misi Desa Muara Mahat Baru

- a. Visi Desa Muara Mahat Baru

Terwujudnya masyarakat desa maju, sehat, mandiri, adil, transparan dan melakukan pemerataan pembangunan dengan skala prioritas serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan berakhhlak mulia.

- b. Misi Desa Muara Mahat Baru

1. Meningkatkan perekonomian secara merata melalui BUMDES.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan muara Mahat Baru yang aman, tenram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menggali potensi pemuda pemudi dengan pelatihan supaya bisa mandiri.

4.3 Letak Geografis Desa Muara Mahat Baru

1. Gambaran Umum

Muara mahat baru merupakan sebuah Desa dengan luas 1239.2Ha. memiliki populasi sebesar 2356 jiwa sehingga jika diratakan, setiap kilometre persegi Desa ini dihuni oleh rata-rata 1.9 jiwa. Muara Mahat Baru merupakan Desa yang memiliki populasi cukup besar dan memiliki masyarakat yang beragam. Ada ras jawa, batak, minang, melayu dan nias. Akan tetapi, sebagian besar penduduk Desa ini merupakan masyarakat ras melayu Riau. Secara Geografis, kondisi atau wilayah Desa Muara Mahat Baru sangat menguntungkan karena Desa Muara Mahat Baru mempunyai dataran yang rendah sehingga potensi untuk pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat bagus.

2. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Muara Mahat Baru dapat diketahui sebagai berikut:

Table 4. 1
Batas Wilayah Desa Muara Mahat Baru

BATAS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kenantan	Tapung
Sebelah selatan	Sei Lambu Makmur	Tapung
Sebelah Timur	Sibuak	Tapung
Sebelah barat	Bukit Payung	Bangkinang

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020⁴²

3. Luas Wilayah Desa Muara Mahat Baru

Luas wilayah Desa muara mahat baru secara keseluruhan berkisar pada luas 1235.2Ha. Akan tetapi, jika dirincikan, maka luas wilayah yang terpakai adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Luas Tanah Berdasarkan Ukuran Yang Digunakan

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1.	Tegal/ Ladang	178.8 Ha
2.	Pemukiman	44.7 Ha
3.	Pekarangan	44.7 Ha
4.	Tanah Perkebunan Swasta	30 Ha
5.	Tanah Perkebunan Rakyat	894 Ha
6.	Kebun Desa	10 Ha
8.	Lapangan Olahraga	1.6Ha
9.	Perkantoran Pemerintah	0.8 Ha
10	Tempat Pemakaman Desa/ Umum	2 Ha

⁴² Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Bangunna Sekolah/ Perguruan Tinggi	7 Ha
12	Fasilitas Pasar	1,6 Ha
13	Usaha Perikanan	20 Ha
Jumlah		1235,2 Ha

4. Iklim Desa Muara Mahat Baru

Iklim Desa Muara Mahat Baru sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu Kemarau dan Hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

4.4 Kondisi Demografi**1. Penduduk Desa Muara Mahat Baru**

Desa Muara Mahat Baru berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Muara Mahat Baru memiliki penduduk tahun 2020 ± 2356 Jiwa dengan Jumlah KK = 621 KK dengan Perincian Lk = 1154 jiwa dan Pr = 1202 jiwa. Jumlah tersebut di bagi menjadi empat Dusun. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung.

Table 4. 3
Jumlah Penduduk Desa Muara Mahat Baru

No	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan
	1154 Jiwa	1202 Jiwa
Total		2356 Jiwa

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

Sumber Daya Manusia yang baik merupakan dasar utama bagi sebuah daerah agar semakin berkembang dan menyongsong maju. Dengan penduduk yang berpendidikan disebuah wilayah, akan menjadi penunjang utama keberhasilan pembangunan. Begitu pula di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tingkat pendidikan sebagai sumber daya manusia akan memberi pengaruh terhadap pembangunan yang ada di Desa Muara Mahat Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

2. Kondisi Sosial Desa Muara Mahat Baru

Kondisi sosial ekonomi Desa Muara Mahat Baru dapat dilihat dan diamati dari berbagai aspek sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jika diamati, tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Mahat Baru dapat di klasifikasikan sebagaimana table berikut:

Tabel 4. 4

Klasifikasi pendidikan warga Desa Muara Mahat Baru

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk TK	58 orang	60 Orang
2.	Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK/ Playgroup	15 Orang	22 Orang
3.	Usia 7–18 Tahun Yang Tidak Pernah Sekolah	1Orang	2 Orang
4.	Usia 7–18 Tahun Yang Sedang Sekolah	309 Orang	297 Orang
5.	Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah	7 orang	9 orang
6.	Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat SD	35 Orang	27 Orang
7.	Usia 18- 56 Tahun Tidak Tamat SLTP	15 Orang	13 Orang
8.	Usia 18 – 56 Tahun Tidak Tamat SLTA	67 Orang	78 Orang
9.	Tamat SD/ Sederajat	20 Orang	25 Orang
10.	Tamat SMP/ Sederajat	49 Orang	41 Orang
11.	Tamat SMA/ Sederajat	510 Orang	532 Orang
12.	Tamat D-1/ Sederajat	3 Orang	3 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13	Tamat D-2/ Sederajat	-	-
14	Tamat D-3/ Sederajat	6 Orang	21 Orang
15	Tamat S-1/ Sederajat	54 Orang	71 Orang
16	Tamat S-2/ Sederajat	4 Orang	-
17	Tamat S-3/ Sederajat	-	1 Orang
18	Tamat SLB A	1 Orang	-
19	Tamat SLB B	-	-
20	Tamat SLB C	-	-
Jumlah		1154 Orang	1202 Orang
Total		2356 Orang	

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

b. Lembaga Pendidikan Desa Muara Mahat baru

Berdasarkan pengamatan penulis dan dokumen laporan data dan profil Desa Muara Mahat baru, lembaga pendidikan di Desa Muara Mahat Baru adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 2 Instansi
2. Taman Kanak-kanak (TK) : 1 Instansi
3. Sekolah Dasar (SD) : 2 Instansi
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 Instansi
5. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 1 Instansi

c. Agama dan Rumah Ibadah Desa Muara Mahat baru

Muara Mahat Baru adalah Desa yang sangat menjunjung tinggi keberagaman etnik, suku, ras bahkan agama. Di Desa ini, terdapat agama-agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia⁴³. Di Desa Muara Mahat Baru ini tidak seluruh agama itu ada sementara tempat ibadah pun begitu juga. Berikut data para pemeluk agama dan rumah ibadah di Desa Muara Mahat baru:

⁴³ Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha Dan Khonghucu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 5 Kepercayaan Yang Dianut Oleh Masyarakat Desa Muara Mahat Baru

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1147 Orang	1199 Orang
2.	Kristen	7 Orang	3 Orang
3.	Katholik		
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Khonghucu	-	-
7.	Aliran Kepercayaan Lainnya		
Jumlah		1154	1202

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

Dari beberapa agama yang ada di Indonesia, dapat kita lihat bahwa di Muara Mahat Baru hanya ada dua agama saja, agama Islam sebagai mayoritas dan Kristen. Dari enam agama resmi yang ada di Indonesia itu dan dua yang terdapat di Desa Muara Mahat Baru ini hanya terdapat satu bentuk rumah ibadah yaitu Masjid sebagai rumah ibadah umat Islam. Sedangkan gereja, vihara ataupun rumah ibadah lainnya tidak ditemui di desa yang mayoritas Muslim ini.

3. Keadaan Ekonomi Desa Muara Mahat Baru

Setelah mengkaji sosial masyarakat di desa ini, maka perlu pula dilihat aspek ekonomi masyarakat daerah ini. jika diamati secara seksama, Desa Muara Mahat Baru ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawit. Hal ini dapat disimpulkan melalui keadaan wilayahnya yang dipenuhi oleh perkebunan. Akan tetapi, profesi ini bukan serta merta telah mewakili profesi seluruh masyarakatnya.

Berdasarkan sumber yang penulis terima, setidaknya ada tiga belas profesi masyarakat di desa ini, berikut data profesi masyarakat desa Muara Mahat Baru tersebut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 4.6
Profesi Masyarakat Desa Muara Mahat Baru

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	393 Orang	-
2	Buruh Tani	30 Orang	25 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	24 Orang	27 Orang
7	Pedagang Keliling	18 Orang	20 Orang
8	Peternak	22 Orang	22 Orang
9	Dokter Swasta	-	2 Orang
10	Bidan Swasta	-	21 Orang
11	Pensiunan	17 Orang	6 Orang
12	Pensiunan Tni/Polri	5 Orang	2 Orang
13	Polri/Tni	8 Orang	2 Orang
	Jumlah	517 Orang	127 Orang
Total		644 Orang	

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

Dari jumlah 2356 jiwa di desa ini memiliki profesi yang beranekaragam, hal ini dapat dilihat dari uraian tabel diatas. Beraneka ragamnya profesi diatas menjadikan desa ini dapat berkembang dan semakin maju dikarenakan keadaan sosial maupun ekonominya dapat berkembang.

Tingkat keberagaman yang tinggi di desa ini, tidak menjadikan mereka saling bermusuhan akibat perbedaan yang ada. Masyarakat didesa ini hidup dengan rukun tertib dan aman. Gejolak sosial tentu selalu menghiasi kehidupan bermasyarakat di daerah ini. akan tetapi, mereka selalu memilih untuk bersatu padu dengan bimbingan syara' agama dan adat sebagaimana semboyan desa ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI
PENUTUP**6.1. KESIMPULAN**

Implementasi Program Keluarga Harapan Di Desa Muara Mahat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan teknis dan pedoman program keluarga harapan dari kementerian sosial, Program keluarga harapan mampu untuk mensejahterakan masyarakat miskin baik dalam aspek Pendidikan, Kesehatan, dan juga kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok.

Pendamping melakukan komunikasi bersama kpm melalui kegiatan P2K2, Selain itu pendamping juga melakukan koordinasi bersama pihak desa , kecamatan dan kabupaten melalui rapat koordinator terkait pelaksanaan PKH di desa Muara Mahat. Jumlah KPM di Desa Muara Mahat Baru sendiri adalah 238 KK, dengan strata pendidikan pendamping minimal strata 1, dalam menunjang hal tersebut pendamping PKH mengikuti beberapa pelatihan PKH.

Disposition adalah kesesuaian tugas berdasarkan fungsi pokoknya, dalam hal ini tugas pendamping selain melakukan pendmapingan dan mengawasi proses PKH, juga merestapel KPM yang dinilai sudah mandiri, sementara untuk tupoksi aparatur desa adalah mendata warga yang kurang mampu untuk dimasukkan ke sistem DTKS.Struktur birokrasi PKH dimulai dari tingkat tertinggi kementerian sampai ke tingkat terendah desa, dibantu oleh pendamping PKH.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan maka penulis menemukan kekurangan yang bisa dijadikan masukkan di masa yang akan datang, beberapa saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah desa harus adil dan trasnparan terkait nama calon KPM yang di ajukan di system Data terpadu Kesejahteraan Sosial
2. Pendampingan tidak terbatas pada materi modul tapi juga melakukan aksi nyata untuk memberikan keahlian/ skill kepada KPM
3. Data di system DTKS harus diperbarui secara berkala
4. Dibutuhkan kerjasama yang baik untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PKH di Desa Muara Mahat Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab,2012, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik , Jakarta : Bumi Aksara
- Adi Fahrudin, 2021,Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung : PT Refika Aditama
- Afida, Ifa.2020, *Konsep Kesejahteraan Pada Masa Islam Klasik Dan Masa Modern*.Jurnal Al-Tsama. 2 (1)
- Amirus Sodiq .2015, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam* , Jurnal Equilibrium, 3(2).2015, 384.
- Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UUP STIM. YKPN
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian,(Bandung : Pustaka Setia,2008,)
- Depi Zahrawati dan Henni Muchtar,2018, *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman*, Jurnal Journal of Civic Education (ISSN: 2622- 237X) Volume 1 No. 4.
- Diah Luthfi Hidayati,2023 *Bantuan Langsung Tunai (BLT) upaya membangun kesadaranteologis terhadap persoalan kemiskinan di Indonesia*.
- Fattah Hanurawan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Hasna, N. M. and dkk. (2020). *Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*”, *Citizenship jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7 (2),108–116.
- Joko Widodo,2012, Analisis Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Jakarta: Bumi Aksara
- Kadjii Yulianto, 2015, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan prilaku Birokrat Dalam Fakta Realitas,Gorontalo: UNG Press
- Kartika Ayu, Sutomo, 2020, dan Kholid Azhari, *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember*, *Jurnal Ekonomi Ekulibrium Volueme 4 No. 1 (2020)*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini 2012, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Yogyakarta: Teras

Naerudin Edwin Kiky Aprianto. (2017). *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islami*, Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2), 239.

Nurdin Usman,2002, konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung: CV Sinar Baru

Nurul Fahmi dan khairil anwar. 2020,*Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan, Bertuah*:Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, 1 (2)

PERMEN SOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1

Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka. Pelajar

Rukmianto Ismandi, 2018, *Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sandi andika dan safitri.2021, *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus desa mekar delima kecamatan tasik putri puyu)*, journal of shariah and islamic economics . 2 (1)

Sri Esti wuryani Djiwandono,2009, Psikologi Pendidikan, Jakarta: PT Gramedia

Subarsono, 2005, “Analisis Kebijakan Publik”, Pustaka Pelajar, Yogjakarta.

Subarsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta

Sujarweni, V.Wiratna. 2014, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press,

Sujarweni, Wiratna. 2014, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Syahputra Adisanjaya, dkk. 2017,*Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan*, jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 4(1),

Wina Sanjaya,2012, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Alat Pengumpulan Data
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR	Komunikasi	Kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan	Observasi Wawancara Dokumentasi
			Konsistensi dalam menjalankan kebijakan	Observasi Wawancara Dokumentasi
	IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR	Sumber daya	Kebijakan dijalakan,	Observasi Wawancara Dokumentasi
			kewenangan yang dimiliki	Observasi Wawancara Dokumentasi
			Kelengkapan sarana dan prasarana	Observasi Wawancara Dokumentasi
			Biaya dan waktu	Observasi Wawancara Dokumentasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa izin.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penyelesaian tugas akhir, penyelesaian laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disposisi (Karakteristik agen pelaksana)	Kinerja pelaksana	Observasi Wawancara Dokumentasi
	Kompetensi	Observasi Wawancara Dokumentasi
Struktur Birokrasi	Pengalaman Kerja	Observasi Wawancara Dokumentasi
	Implementasi kebijakan	Observasi Wawancara Dokumentasi
	Capaian tujuan	Observasi Wawancara Dokumentasi

© **Lampiran 2**

DOKUMENTASI



Gambar 1

Pertemuan kelompok Materi Pengelolaan Keuangan Keluarga



Gambar 2

Kegiatan Pendampingan P2K2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3
Wawancara Informan Penelitian



Gambar 4
Wawancara Informan Penelitian



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MEMBANTU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

a. Komunikasi Pendamping

- 1) Bagaimana cara pendamping mengkomunikasikan kebijakan PKH kepada KPM?
- 2) Bagaimana kebijakan pkh terbentuk?
- 3) Apa regulasi terkait kebijakan pkh?
- 4) Apa regulasi terkait tugas pendamping dalam kebijakan PKH?
- 5) Bagaimana kriteria penerima pkh di desa muara mahat?
- 6) Bagaimana implementasi kebijakan pkh di desa muara mahat?
- 7) Apakah dilakukan sosialisasi sebelum kebijakan pkh dilaksanakan?
- 8) Bagaimana bentuk komunikasi sosialisasi yang dilakukan pendamping tersebut?
- 9) Bagaimana konsistensi kebijakan pkh di desa muara mahat?
- 10) Apakah kebijakan pkh sesuai dengan sasaran?
- 11) Bagaimana bentuk penyampaian informasi antara pihak pembuat kebijakan dan pihak pelaksana kebijakan?
- 12) Apa hambatan dalam proses penyampaian kebijakan kepada pihak penerima kebijakan?
- 13) Apakah pkh mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat miskin?

b. Sumber Daya PKH

- 1) Berapa Jumlah sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam penyaluran PKH?
- 2) Apa tingkat pendidikan pendamping PKH?
- 3) Bagaimana sumberdaya PKH sendiri di desa muara mahat (dalam bidang pendidikan, sosial kesejahteraan dan kesehatan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Berapa jumlah penerima PKH di desa muara mahat?
- 5) Berapa masyarakat penerima KIS dan KIP di desa muara mahat?
- 6) Bagaimana Kriteria sumberdaya yang termasuk kedalam kebijakan PKH?
- 7) Apa bentuk bantuan sosial yang diterima kpm di desa muara mahat?
- 8) Siapa pelaksana kebijakan pkh di desa muarah mahat?
- 9) Siapa penerima kebijakan pkh di desa muara mahat?
- 10) berapa jumlah kpm PKH?
- 11) siapa yang memiliki wewenang dalam penyaluran batuan pkh
- 12) Kapan waktu pkh disalurkan?
- 13) Berapa besaran bantuan yang diterima?
- 14) Apakah pendamping pernah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas? dalam bentuk apa?
- 15) Sarana dan prasarana dalam penyaluran bantuan pkh?

c. Disposisi pendamping

- 1) Bagaimana upaya pendamping dan pemerintah desa untuk masyarakat supaya bisa mendapatkan PKH di desa muara mahat?
- 2) Bagaimana prosedur penerimaan PKH didesa muara mahat?
- 3) Bagaimana alur penyaluran pkh di desa muara mahat?
- 4) Bagaimana peran pemerintah desa dan pendamping dalam melakukan disposisi kebijakan PKH dari pemerintah pusat?
- 5) Bagaimana kinerja pelaksana kebijakan
- 6) Tugas fungsi pokok pelaksana kebijakan
- 7) Apakah kompetensi yang diberikan kepada kpm?
- 8) apakah kompetensi yang harus dimiliki pemerintah sebagai pemangku kebijakan pkh
- 9) Apakah peran pendamping pkh dalam menyaluran pkh di desa muarah mahat?
- 10) Berapa lama pengalaman kerja yang dimiliki pendamping?

Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana alur pelaksanaan pkh di desa muara mahat?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bagaimana struktur birokrasi di PKH desa muarah mahat?
- 3) Siapa yang mengambil peran paling besar dalam penyaluran PKH?
- 4) Peran seperti apa yang dimiliki baik oleh pemerintah desa ataupun pendamping pkh?
- 5) Bagaimana implementasi pkh di desa muara mahat?
- 6) Apakah pkh mampu untuk mensejahterakan keluarga
- 7) Bagaimana tahapan penyaluran bantuan pkh?
- 8) Apakah pkh mampu mensejahterakan KPM (masyarakat miskin) ?
- 9) Apa tantangan dan hambatan dalam penyaluran pkh?
- 10) Apa output yang ingin di capai dalam PKH?
- 11) Apa capaian yang di capai oleh pihak pelaksana kebijakan dalam program pkh sampai saat ini?
- 12) Apa kendala dalam penyaluran PKH?
- 13) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat desa?
- 14) Bagaimana PKH sebagai suatu kebijakan publik?



UNIVERSITAS ISLAM NEGARA SUSKA RIAU

Lampiran 4

Reduksi Data

No	Informan	Indikator	Hasil Wawancara/ Observasi	Kesimpulan
1	Renaldo Ginting (November 2024)	Komunikasi Pendamping (Bentuk Komunikasi)	<i>Pendamping berkoordinasi dengan pihak desa sebulan sekali</i>	Komunikasi adalah hal utama dalam terwujudnya efektifitas suatu program, dalam hal ini pendamping melakukan komunikasi dengan berkoordinasi kepada pihak desa sebulan sekali, koordinasi ini juga dilakukan di pihak kecamatan dan juga kabupaten dalam singkronisasasi data
2	Eza Aprililia (Novermber 2024)	Komunikasi Pendamping (Bentuk Komunikasi)	<i>Seluruh informasi disampaikan saat pertemuan kelompok p2k2</i>	KPM menerima informasi lewat kegiatan p2k2, selain informasi KPM juga mendapatkan pendampingan melalui modul yang sudah ditetapkan kemensos.
3	Eza Aprililia (November 2024)	Komunikasi Pendamping (Regulasi PKH)	<i>Setidaknya ada 3 regulasi awal terkait PKH yaitu UU No 11 Tahun 2009, Perpres No 63 Tahun 2017, Permenses</i>	Dalam salah satu regulasi tepatnya di permenses no 1 tahun 2018 dijelaskan bahwa pendamping memiliki 3 peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

			No 1 Tahun 2018.	yaitu fasilitator, mediator dan dinamisator
	Rinaldo Ginting (November 2024)	Komunikasi (Regulasi PKH)	<i>Regulasi PKH berdasarkan rapat desa terkait data terpadu kesejahteraan sosial</i>	Dalam rapat koordinasi pihak desa rutin dilakukan pemantauan dan peninjauan pkh di desa Muara Mahat.
6	Eva Aprilia (November 2024)	Komunikasi Pendamping (Implemenasi PKH Di Desa Muara Mahat)	<i>PKH terimplementasi dengan baik sesuai nama-nama yang sudah di SK kan oleh Kementerian Sosial</i>	Implementasi PKH sudah berjalan dengan baik
	Rinaldo Ginting (November 2024)	Komunikasi Pendamping (Sosialisasi PKH)	<i>Sosialisasi PKH dilaksanakan di media sosial, media masa dan juga sosialisasi dilakukan langsung oleh aparatur desa muara mahat</i>	Sosialisasi dilakukan baik secara langsung ataupun sosial media
	Eva Aprilia (November 2024)	Komunikasi Pendamping (Sosialisasi PKH)	<i>Sosialisasi bukan hanya difokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan PKH namun juga aspek pemantauan, pengaduan, pengembangan kebijakan dalam membangun dan mendukung PKH</i>	Fokus sosialisasi mencangkup berbagai aspek mulai dari implementasi, kendala, keberhasilan, dan pengembangan pkh.
8	Eva Aprilia (November 2024)	Komunikasi Pendmaping	<i>Sosialisasi saat kegiatan P2K2 dengan materi modul yang sudah diberikan oleh kementerian sosial</i>	Terlihat disini bentuk komunikasi kelompok pada kegiatan pertemuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Vica Landari (November 2024)	Komunikasi (Hambatan pkh)	<i>Tidak tepat sasaran, orang mampu masih tetap menerima PKH</i>	kelompok P2K2 membahas modul yang sudah diberikan
10	Rinaldo Ginting (November 2024)	Komunikasi (Hambatan PKH)	<i>Hambatan yang dirasakan oleh pemerintah desa yaitu penyampaian sistem terkait PKH kepada masyarakat.</i>	Hambatan dari pemerintah desa yaitu komunikasi PKH kepada masyarakat
11	Eva Aprilia (November 2024)	Sumberdaya PKH (Sumberdaya Manusia)	<i>Yang terlibat dalam proses pkh adalah koordinator regional, koordinator wilayah pendamping dan KPM</i>	Berbagai pihak mulai dari pihak pusat sampai unit terkecil yaitu desa selalu terlibat dalam penyaluran bantuan PKH
121	Eva Aprilia (November 2024)	Sumberdaya PKH (Tingkat pendidikan)	<i>Statifikasi pendidikan pendamping PKH Minimal strata satu dengan</i>	Pendamping harus memiliki pendidikan terakhir strata satu dengan spesifikasi bebas dan memiliki pengalaman bekerja di masyarakat.
13	Rinaldo Ginting (November 2024)	Sumberdaya KPM (Jumlah KPM)	<i>Jumlah KPM di desa Muara Mahat adalah 238 KK</i>	Kpm PKH di desa Muara Mahat berjumlah 238 KK dengan mayoritas Ibu rumah tangga
14	Rinaldo Ginting (November 2024)	Sumberdaya KPM (Subjek penerima PKH)	<i>Penerima PKH adalah mereka yang memiliki komponen, seperti</i>	Untuk menjadi KPM PKH terutama harus memiliki



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 Eza Aprilia (November 2024)	Sumberdaya manusia (Sumbek PKH)	<i>ibu hamil dan balita, anak usia sekolah, lansia dan disabilitas</i>	komponen PKH diantaranya ibu hamil/ balita, anak usia sekolah, lansia dan juga disabilitas
16 Eza Aprilia (November 2024)	Sumberdaya Manusia (Pelatihan Pendamping)	<i>Mereka yang menerima PKH adalah yang sudah di SK an oleh kementerian sosial.</i>	KPM yang memenuhi komponen akan di ajukan oleh pendamping untuk di SK an oleh kementerian sosial
17 Rinaldo Ginting (November 2024)	Kesejahteraan KPM PKH	<i>Pendmaping pernah mengikuti beberapa kali pelatihan diantaranya peningkatan kapasitas sdm, validasi dan verifikasi penyaluran bantuan</i>	Pendamping wajib mengikuti pelatihan yang di adakan oleh kementerian sosial di wilayah masing-masing terkait peningkatan kapasitas pendamping dan juga valiasi dan verifikasi penyaluran bantuan.
18 Rinaldo Ginting (November 2024)	Disposisi Pendamping (Upaya Pemerintah	<i>Sejahtera disini memiliki arti yang luas yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok , jika dilihat dari aspek itu maka kpm pkh bisa dikatakan sejahtera karena sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya</i>	PKH mampu mensejahterakan KPM salah satunya dengan terpenuhi kebutuhan pokok, namun begitu kpm juga harus diberikan skill, motivasi yaitu lewat kegiatan p2k2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Desa)	memasukkan warga yang dinilai kurang mampu kedalam sistem Dtks	data warga desa yang dinilai kurang mampu
19	Eva Aprililia (November 2024)	Disposisi Pendamping (November 2024)	<i>Disposisi pendamping dalam efektifitas pkh adalah dengan merestapel atau melakukan graduasi kepada KPM yang dinilai sudah mampu</i>	Dalam menunjang efektifitas program PKH, maka pendamping melakukan salah satu fungsinya yaitu graduasi atau restapel kpm yang dinilai sudah mampu.
20	Eva Aprililia (November 2024)	Disposisi (Alur penyaluran PKH)	<i>Alur penerimaan PKH dimulai dari pengajuan di DTKS desa masing-masing, melaksanakan pertemuan awal dan validasi, Penetapan KPM PKH, Penyaluran bantuan, pemuktahiran data, verifikasi komitmen dan juga proses pendampingan”</i>	Sistematika penyaluran PKH sudah di atur mulai di awal sampai kepada proses pendampingan
21	Rinaldo Ginting (November 2024)	Disposisi (Alur PKH)	<i>Penyaluran bantuan PKH dilaksanakan secara bertahap dalam satu masa anggaran</i>	Pelaksanaan PKH dilakukan secara bertahap
22	Eza Aprililia (November 2024)	Disposisi (Peran Pendamping)	<i>Peran pendamping sebagai fasilitator, mediator dan penyuluhan dalam melakukan penyuluhan dan</i>	Pendamping memiliki 3 peran utama yaitu fasilitator, mediator dan penyuluhan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik		pelatihan kepada KPM, selain itu juga melakukan monitoring terhadap proses penyaluran bantuan pkh			
23	UIN Suska Riau	Eza Aprililia (November 2024)	Disposisi (Penilaian Kinerja)	<i>Bentuk pelaporan dan evaluasi kinerja pendamping yaitu membuat laporan setiap hari kerja melalui aplikasi ESDM PKH yang di approve oleh coordinator kabupaten</i>	Penilaian kinerja dibuat dalam bentuk laporan bulanan yang kemudian di approve oleh koordinator kabupaten
24		Eza Aprililia (November 2024)	Disposisi (Tugas Dan Fungsi Pokok Pendamping)	<i>Tugas pokok pendamping adalah memberikan pendampingan dan memantau proses penyaluran PKH kepada KPM PKH</i>	Memberikan pendampingan dan memantau berjalannya proses penyaluran PKH
25	State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau	Lisa Dianti (November 2024)	Disposisi (Tugas Dan Fungsi Pokok KPM)	<i>wajib mengikuti kegiatan dan pertemuan kelompok, memeriksa Kesehatan rutin, adapun hak kami adalah mendapatkan penyaluran PKH'</i>	Wajib mengikuti kegiatan pertemuan kelompok
26		Eza Aprililia (November 2024)	Disposisi (Tugas Dan Fungsi Pokok KPM)	<i>Kewajiban KPM PKH harus memenuhi dari setiap komponen yang dimiliki,, dicontohkan komponen</i>	<i>Kewajiban KPM PKH harus memenuhi dari setiap komponen dalam PKH itu sendiri</i>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				
	Eza Aprililia (November 2024)	Struktur Birokrasi	<p><i>kesehatan maka wajib memeriksakan Kesehatan di puskesmas atau posyandu bagi balita, komponen Pendidikan adalah anak kpm wajib untuk sekolah, komponen kesejahteraan yaitu mengikuti pelatihan dan pendampingan kelompok</i></p> <p><i>“ Dimulai dari tingkat tertinggi Menteri, direktur ,koreq, koordinator wilayah provinsi, koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, pendamping sosial”</i></p>	Melibatkan pemerintah pusat, kabupaten, wilayah dan desa
28	Rinaldo Ginting (November 2024)	Struktur Birokrasi	<p><i>Dalam penyaluran PKH semua pihak yang terlibat bekerjasama dengan baik. Pihak pemerintah desa sangat mendukung PKH dalam program upaya pengentasan kemiskinan dan pemutusan rantai kemiskinan”</i></p>	Dalam penyaluran PKH semua pihak yang terlibat bekerjasama dengan baik

©

29 Hak cipta milik UIN Suska Riau	Rinaldo Ginting (November 2024)	Struktur Birokrasi (Implementasi PKH)	<i>“Implementasi PKH di desa muara mahat bisa dinilai cukup baik dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi PKH di desa muara mahat bahwa beberapa KPM sudah melakukan graduasi mandiri melalui program Pena Berdikari”</i>	Menurut hasil observasi pelaksanaan pkh di desa muara mahat sudah terlaksana dengan baik walaupun pada beberapa aspek masih ada kendala
	Eza Aprililia (November 2024)	Struktur Birokrasi (Implementasi PKH)	<i>“Implementasi PKH di desa muara mahat dikatakan baik karena sesuai dengan petunjuk Teknik penyaluran PKH yang dikeluarkan oleh kemensos.”</i>	“Implementasi PKH di desa muara mahat dikatakan baik karena sesuai dengan petunjuk Teknik penyaluran PKH yang dikeluarkan oleh kemensos.”
	Vica Landari (November 2024)	Struktur Birokrasi (Implementasi PKH)	<i>PKH di desa muara mahat dikatakan baik karena pendamping melakukan tugasnya dengan baik, tidak ada kendala dalam penyaluran PKH”</i>	Setiap elemen memiliki peran dan tugasnya masing-masing dan sudah di jalankan sesuai aturan
	Lisa Dianti (November 2024)	Struktur Birokrasi (Implementasi PKH)	<i>PKH berjalan dengan baik dan dapat membantu perekonomian keluarga melalui pemenuhan kebutuhan pokok”</i>	PKH membantu perekonomian keluarga melalui pemenuhan kebutuhan pokok”
	Rinaldo Ginting (November 2024)	Struktur Birokrasi (Kesejahteraan Keluarga)	<i>Menurut saya PKH dapat mensejahterakan KPM PKH,</i>	Terpenuhi kebutuhan pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<i>Setidaknya KPM terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anaknya”</i>	
Lisa Dianti (November 2024)	Struktur Birokrasi (Kesejahteraan Keluarga)	PKH Mampu mensejahterakan keluarga saya,, Pendidikan anak saya terjamin dan Kesehatan keluarga juga terjamin”	PKH mensejahterakan keluarga dari aspek Pendidikan anak terjamin dan Kesehatan keluarga	
Vica Lindari (November 2024)	Struktur Birokrasi (Kesejahteraan Keluarga)	“setalah menjadi anggota PKH saya merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga,”	Pkh mampu membantu ekonomi keluarga	